

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asmara, Galang, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016)

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Fatwa, A.M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas, 2009)

Gautama, Candra, *Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000).

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia, *Teori dan Metode Pengawasan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007).

Handoyo, B.H.C., *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi)*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015).

Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2002)

Huda, Ni'matul, *Lembaga Dalam Masa Transisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008)

Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem tentang Segi Kontrol terhadap Pemerintah (Ed.II)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993).

Marbun, S.F., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

MD, Moh. Mahfud, *Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Muin, Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2008).

Pramukti, Angger Sigit dan ChahyaningsihMeylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016)

Purbopranoto, Koentjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung; Bina Cipta, 1975).

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Publik*, (Bandung:Nuansa Cendekia, 2012).

Roy Gregory and Philip Giddings, *Righting Wrongs, The Ombudsman in Six Continents*, (Amsterdam:IOS, 2000).

Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan Asas-asasUmum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).

Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

Situmorang, Victor dan Juhir, Jusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Apaaratur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Soeprapto, Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar Pembentukannya)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Surachman, RM dan Sujuta, Antonius, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional (Sebuah Antologi)*, (KomisiOmbudsman Nasional,2000).

Thamrin, Husni, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Jakarta:Aswaja Pressindo, 2013).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, (Jakarta: Setara Press, 2013).

Peraturan Perundangan:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009
6. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Keputusan Presiden No. 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten

Jurnal:

Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, (*Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018)

Azhar, Muhammad, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, (Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015)

Makalah:

Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Keperdataan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, (Makalah: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1996).

Teten Madsuki, *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*, (Makalah disampaikan pada: *Workshop on Good Governance*, Kerjasama antara Universitas Utrecht dengan Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Oktober 4-5, 2001)

Miftah Toha, *Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7, Jakarta, 1999)

Frans H. Winarta, *Good Governance and Corruption*, (Makalah *Conference on Good governance East Asia Realities, Problems, and Challenges*, diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta, 7 November 1999)

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan, *Politik Lokal/Nasional, Kepemimpinan dan Good Governance*, (Makalah pada Rapat Konsolidasi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, 4 September 2001).

Claes Eklaundh, *"The Swedish Parliamentary Ombudsman System"*, (Makalah Konferensi Internasional Pengembangan Komisi Hak Asasi Manusia dan Lembaga Ombudsan, 18-22 Mei di Addis Ababa, 1988).

Jusuf Wanandi, *Good Governance dan Kaitannya dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan: Agenda Masa Depan*, (Majalah Analisis CSIS Tahun XXVII, No. 3, Juli-September 1998).

Skripsi/Tesis:

Wibawa, Herry, *Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan dengan Pengawasan PERATUN)*, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010)

S., Shita Mariza, *Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia*, (Skripsi sarjana, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016).

Khairiyati, *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*, (Skripsi Sarjana Hukum, Program Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2014)

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ed. Eighth*, (A Thomson Business: 2004 West).

Internet:

Asep Cahyana, "Gubernur DKI Jakarta Abaikan Rekomendasi Ombudsman," <http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--gubernur-dki-jakarta-abaikan-rekomendasi-ombudsman>.

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), "Good Governance", ([http:// www. Socialcommission.html](http://www.Socialcommission.html))

Ombudsman Republik Indonesia (Asas-asas Ombudsman Republik Indonesia), <http://ombudsman.go.id/artikel>.